

ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TOL TANGGUL LAUT SEMARANG-DEMAK DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Jessica Xena Boru Namora¹, Supratiwi²

Email : jexenamora@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile: (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp15,3 triliun memuat ketegangan antara narasi mitigasi banjir rob dan kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Penelitian ini menganalisis implementasi TTLSD sebagai arena ekonomi-politik, mengidentifikasi prioritas kepentingan dalam kebijakan tersebut, serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat pesisir Desa Bedono dan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber yang dipilih secara purposif, meliputi pejabat pemerintah, aktivis WALHI, kepala desa, dan warga terdampak. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori ekonomi politik *accumulation by dispossession* Harvey (2003), *state capitalism* Jessop (2016), dan Rachbini (1996),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TTLSD bersifat sangat sentralistik, memprioritaskan kawasan industri dan investor melalui mekanisme “tanah musnah” serta kompensasi yang rendah. Masyarakat pesisir mengalami marjinalisasi berlapis berupa kehancuran mata pencaharian, fragmentasi sosial, dan hilangnya pengetahuan lokal. Penelitian ini merekomendasikan proses kebijakan yang lebih inklusif, mekanisme kompensasi yang lebih adil, serta pengakuan yang lebih besar terhadap pengetahuan ekologi lokal dalam proyek PSN mendatang.

Kata kunci: ekonomi politik, Proyek Strategis Nasional, tanggul laut, *accumulation by dispossession*, marjinalisasi pesisir

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The construction of Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) as a National Strategic Project (PSN) valued at Rp15.3 trillion contains tensions between the narrative of rob flood mitigation and larger economic-political interests. This study analyzes the implementation of TTLSD as a political-economic arena, examines policy priorities, and investigates the socio-economic impacts on the coastal communities of Desa Bedono and Desa Sriwulan, Sayung Subdistrict, Demak Regency.

Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with seven purposively selected informants, including government officials, WALHI activists, village heads, and affected residents. The analysis draws on Rachbini's (1996) political economy theory, Harvey's (2003) accumulation by dispossession, and Jessop's (2016) state capitalism.

The findings indicate that TTLSD implementation is highly centralized, prioritizing industrial zones and investors through the "vanished land" mechanism and inadequate compensation. Coastal communities experience multilayered marginalization, including livelihood destruction, social fragmentation, and loss of local knowledge. This study recommends more inclusive policy processes, fairer compensation mechanisms, and greater recognition of local ecological knowledge in future PSN projects.

Keywords: political economy, National Strategic Project, sea dike, accumulation by dispossession, coastal marginalization

PENDAHULUAN

Banjir rob telah menjadi krisis ekologis yang berlangsung puluhan tahun di kawasan pesisir utara Jawa, khususnya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sejak tahun 1990-an, abrasi dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang mencapai 10-20 sentimeter per tahun telah mengubah lanskap sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara dramatis. Desa Bedono saja mencatat kehilangan lahan akibat abrasi sebesar 669 hektar hingga 2020, sementara sekitar 300 kepala keluarga terpaksa meninggalkan permukiman mereka yang telah tenggelam (DKP Kabupaten Demak, 2023).

Dalam konteks krisis ini, pemerintah pusat menetapkan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Proyek senilai Rp 15,3 triliun ini dikampanyekan sebagai solusi komprehensif yakni satu

konstruksi yang sekaligus berfungsi sebagai jalan tol dan tanggul laut pelindung rob. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan masa konsesi 35 tahun (batas maksimal 50 tahun) melibatkan konsorsium BUMN besar yakni PT Pembangunan Perumahan dan PT Wijaya Karya.

Namun di balik narasi mitigasi bencana yang dominan, terdapat logika kepentingan yang lebih kompleks. Koridor Semarang-Demak adalah rumah bagi kawasan industri Kaligawe-Terboyo, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Bandara Ahmad Yani, yang secara kolektif menyumbang sekitar 25 persen PDB Jawa Tengah. Pertanyaan tentang kepentingan siapa sesungguhnya TTLSD dirancang menjadi sangat relevan ketika kita melihat bahwa tiga perempat wilayah Desa Bedono berada di luar *coverage* tanggul,

sementara kawasan industri mendapat perlindungan penuh.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis ekonomi politik untuk membaca TTLSD sebagai arena di mana kepentingan-kepentingan saling bersinggungan. Tiga rumusan masalah yang dijawab antara lain Bagaimana implementasi kebijakan TTLSD berlangsung sebagai arena ekonomi-politik, kepentingan apa yang diprioritaskan dalam kebijakan TTLSD, dan bagaimana dampak sosial-ekonomi kebijakan TTLSD terhadap masyarakat Desa Bedono dan Desa Sriwulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami proses, makna, dan relasi kekuasaan yang bekerja di balik kebijakan infrastruktur berskala nasional, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui metode kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuh narasumber yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan substantif terhadap TTLSD. Narasumber meliputi Ika (Kepala Bidang PPKL, DLHK Provinsi Jawa Tengah, wawancara 5 Februari 2026), Kusdarmawan (Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Demak, 2 Februari 2026), Bagas Kurniawan (Aktivis Lingkungan, WALHI Jawa Tengah, 6 Februari 2026), Sukarman (Camat Sayung, 26 Januari 2026), H. Agus Salim (Kepala Desa Bedono, 26 Januari 2026), Nurohman (Kaur TU & Umum, Desa Bedono, 11 Februari 2026), dan Ridho (Sekretaris Desa Sriwulan, 11 Februari 2026). Keragaman posisi narasumber, dari birokrat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, hingga warga terdampak, memberikan triangulasi perspektif yang kuat.

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan (Perpres, PP, RTRW), data BPS Kabupaten Demak, laporan

WALHI Jawa Tengah, dan kajian akademis terdahulu. Analisis data menggunakan teknik tematik yang diorientasikan pada tiga konsep operasional yakni kebijakan infrastruktur sebagai arena ekonomi-politik (Jessop, 2016. Rachbini, 1996), *accumulation by dispossession* (Harvey, 2003), dan dampak marjinalisasi sosial-ekonomi.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori *state capitalism* dari Bob Jessop (2016) yang menekankan bahwa negara dalam kapitalisme kontemporer bukanlah aktor netral, melainkan secara aktif merancang struktur kelembagaan dan regulasi untuk mereproduksi kondisi-kondisi yang menguntungkan akumulasi kapital. Konsep kunci Jessop adalah *strategic selectivity*, yakni kecenderungan struktur negara untuk lebih responsif terhadap kepentingan kapital besar dibanding komunitas marjinal.

Kedua, teori *accumulation by dispossession* dari David Harvey (2003) yang menjelaskan mekanisme akumulasi kapital kontemporer melalui perampasan aset, akses, dan sumber penghidupan yang sebelumnya berada di luar sirkuit kapital. Harvey mengidentifikasi terdapat empat mekanisme utama yakni privatisasi aset komunal, tekanan finansial, manipulasi krisis, dan fasilitasi negara melalui instrumen hukum. Dalam konteks infrastruktur pesisir, teori ini menjelaskan bagaimana bencana rob dapat difungsikan sebagai pintu masuk bagi agenda perampasan yang legal secara formal namun merugikan komunitas secara substantif.

Ketiga, kerangka ekonomi politik pembangunan Indonesia dari Rachbini (1996) yang menekankan bahwa dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, siapa yang berkuasa menentukan siapa mendapat apa dari pembangunan. Kelompok dengan akses ke arena kebijakan yang lebih kuat akan mampu memasukkan kepentingan mereka ke dalam bingkai 'kepentingan nasional', sementara komunitas yang lemah secara struktural tidak memiliki mekanisme

efektif untuk mempertanyakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi TTLSD sebagai Arena Ekonomi-Politik: Struktur Kewenangan yang Terpusat

Penetapan TTLSD sebagai PSN melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 bukan sekadar labeling administratif. Status PSN adalah instrumen yang secara praktis memindahkan *locus of control* dari tingkat daerah ke pusat melalui apa yang Jessop (2016) sebut sebagai *state rescaling*. Dampak paling konkret dari sentralisasi ini terlihat pada pergeseran kewenangan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sebelum 2021 kewenangan berada di DLHK Provinsi Jawa Tengah, namun setelah penambahan komponen reklamasi dalam desain proyek, kewenangan berpindah sepenuhnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tingkat pusat.

Konsekuensinya dramatis dari segi akuntabilitas lingkungan. Ika, Kepala Bidang PPKL DLHK Provinsi Jawa Tengah menyatakan *"Kalau draftnya ada, tapi itu kan belum final. Waktu pengajuan dan pembahasan kita dilibatkan, tapi pada saat final kami juga belum dapat tembusannya, saya sudah meminta juga dokumennya tapi belum diberikan juga"*. Institusi yang secara hukum diberi mandat mengawasi lingkungan tidak memiliki akses terhadap dokumen standar yang menjadi acuan pengawasannya. Di tingkat kabupaten, posisinya bahkan lebih marginal. Kusdarmawan dari DLH Kabupaten Demak mendeskripsikan *"Proyek itu lintas kabupaten, kita hanya kabupaten. Untuk pengawasan lingkungan kita bisa melaporkan kalau ada permasalahan, tapi untuk menghentikan atau meminta perbaikan itu harus melalui jalur yang panjang karena kewenangan ada di pusat."*

Struktur piramida kewenangan ini dari KLHK Pusat → DLHK Provinsi (pasif) → DLH Kabupaten (marginal) → Pemerintah Desa (tanpa kewenangan), adalah ekspresi konkret dari *strategic selectivity* Jessop (2016), sistem yang secara struktural lebih responsif terhadap

kepentingan dari atas daripada masukan dari bawah, bahkan ketika yang di bawah justru lebih tahu kondisi lapangan.

Dimensi representasi kepentingan dalam perencanaan juga bermasalah. Sosialisasi proyek dilaksanakan namun bersifat informatif satu arah, bukan deliberatif. Sukarman, Camat Sayung, mengakui bahwa partisipasi masyarakat diukur dari kehadiran dalam undangan, bukan dari kemampuan mempengaruhi keputusan. Ketika saluran formal terbukti tidak efektif, warga Desa Bedono melakukan demonstrasi langsung ke kantor Gubernur. Namun bahkan tekanan itu, seperti diakui Nurohman, *"tidak banyak yang berubah setelah itu."* Yang lebih mengkhawatirkan adalah pengakuan Kepala Desa Bedono, H. Agus Salim, bahwa pemerintah desa *"takut dikriminalisasi"* jika terlalu vokal membela warganya, sehingga warga diminta mengadu sendiri tanpa melalui saluran desa. Represi struktural Jessop menjangkau lebih dalam dari yang diasumsikan tidak hanya ke warga biasa, tetapi juga ke pejabat lokal.

Kepentingan Ekonomi Besar di Balik Narasi Mitigasi Bencana

Setiap proyek infrastruktur besar memiliki narasi resmi. Narasi resmi TTLSD adalah mitigasi rob sekaligus konektivitas Pantura. Namun analisis data lapangan dan dokumen kebijakan mengungkap jarak yang signifikan antara narasi dan prioritas aktual. Bagas Kurniawan dari WALHI Jawa Tengah menangkap esensi ketegangan ini *"Motivasi terbesar yang bahkan ditaruh di depan adalah soal menyelamatkan kepentingan ekonomi. Di Semarang Demak itu banyak sekali industri dan infrastruktur lainnya yang menunjang roda ekonomi itu berputar."*

Logikanya sederhana namun ironis. Rob sudah menghantam permukiman nelayan Kecamatan Sayung sejak awal 2000-an, namun respons infrastruktur berskala nasional baru datang ketika rob mulai mengancam kawasan industri Kaligawe-Terboyo dan Jalur Pantura. Dua dekade rob yang menenggelamkan tambak dan rumah nelayan tidak menghasilkan PSN, namun ancaman terhadap kawasan yang menyumbang sekitar 25 persen PDB Jawa Tengah menghasilkan proyek Rp 15,3 triliun.

Ini bukan korelasi yang bisa diabaikan sebagai kebetulan. Dalam kerangka Harvey (2003), mekanisme ini adalah *disaster capitalism* dimana kondisi krisis dimanfaatkan sebagai justifikasi dan peluang untuk mendorong proyek-proyek yang melayani akumulasi kapital besar.

Bukti paling eksplisit dari logika ini tersimpan dalam dokumen kebijakan formal. Revisi RTRW Jawa Tengah November 2024 mencantumkan rencana pembangunan Sayung Industrial Park di kawasan pesisir yang sebelumnya tenggelam dan yang akan 'dikeringkan kembali' setelah TTLSD berfungsi. Tanah-tanah yang dijual warga dengan harga Rp 2.500 per meter persegi ke koperasi swasta karena mereka tidak punya pilihan lain, kini akan menjadi lokasi kawasan industri baru. Sekuens ini, dari tenggelam ke penjualan murah ke pengeringan melalui proyek negara ke kawasan industri, adalah *accumulation by dispossession* dalam bentuknya yang paling lengkap (Harvey, 2003).

Mekanisme regulasi sebagai fasilitasi kapital juga terlihat jelas dalam konsep 'tanah musnah'. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, lahan yang tenggelam secara fisik dianggap hapus haknya. Praktik ini mengakibatkan warga yang tanahnya tenggelam karena bencana rob selama puluhan tahun, yang tidak pernah mendapat bantuan bencana dari negara, justru kehilangan hak kompensasi penuh ketika tanahnya dibutuhkan untuk proyek infrastruktur nasional. Pemerintah menawarkan skema 'kerohiman' seharga Rp 400.000 per meter persegi, jauh di bawah harga pasar lahan kering setempat yang mencapai Rp 900.000 per meter persegi. Selisih 55 persen ini, seperti diungkap Nurohman, berarti nilai kompensasi tidak cukup untuk membeli lahan pengganti yang setara.

Dampak Marjinalisasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Bedono dan Desa Sriwulan

Dampak TTLSD terhadap masyarakat pesisir bersifat asimetris, berlapis, dan dalam banyak dimensinya tidak dapat dipulihkan hanya dengan selesainya konstruksi. Analisis mencakup empat

dimensi yakni perubahan mata pencaharian dan pendapatan, beban biaya adaptasi, perubahan kohesi sosial, dan erosi pengetahuan lokal.

Pada dimensi mata pencaharian, pergeseran yang terjadi bukan dimulai oleh TTLSD, melainkan TTLSD menjadi titik percepatan terakhir dari proses panjang yang sudah berlangsung sejak 1980-an mulai dari petani sawah ke petambak (1990-an), dari petambak ke nelayan (2000-an), dan kini dari nelayan ke serabutan atau merantau ke kota. Setiap pergeseran bukan pilihan bebas, melainkan adaptasi yang dipaksakan oleh hilangnya akses terhadap sumber daya produksi sebelumnya. Ridho, Sekretaris Desa Sriwulan, menggambarkan "*Mereka yang mau bertahan jadi nelayan bergabung di Desa Bedono tapi mereka yang tidak mau jadi nelayan lagi beralih profesi, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang serabutan, ada juga yang hanya jadi penjual ikan yang beli di wilayah lain lalu dijual kembali.*"

Penurunan pendapatan yang menyertai pergeseran profesi ini dapat diukur secara indikatif. Siklus panen tambak bandeng yang semula 4-6 bulan kini memanjang menjadi 8 bulan atau lebih dengan hasil tidak optimal, yang secara kasar berarti penurunan pendapatan 50-70 persen dari kondisi sebelumnya. Budidaya kerang hijau di Desa Bedono hancur total, sementara kompensasi yang diberikan hanya Rp 3-4 juta per unit rumpon sekali pakai, tidak setara dengan satu bulan pendapatan normal dari budidaya yang berfungsi. Ketika disandingkan dengan UMK Kabupaten Demak 2024 sebesar Rp 2.190.000 per bulan, kondisi defisit ekonomi struktural yang dimaksud Rachbini (1996) tergambar dengan sangat nyata.

Dimensi beban adaptasi menunjukkan transfer biaya ekologis yang massif kepada komunitas yang paling tidak mampu menanggungnya. Laju *land subsidence* di pesisir Sayung mencapai 10-20 sentimeter per tahun, memaksa warga meninggikan rumah 3-4 kali per dekade dengan biaya Rp 5-20 juta per siklus, seluruhnya ditanggung secara pribadi. Agus Salim, Kepala Desa Bedono,

menggambarkan: *"Setiap ada kelebihan uang masyarakat menabung untuk meninggikan rumah."* Tabungan bukan instrumen peningkatan ekonomi, melainkan sekadar biaya bertahan dari ancaman yang terus berulang. Sementara itu, jalan desa dinaikkan lebih dari tiga meter dalam tiga puluh tahun atas biaya pemerintah, namun infrastruktur rumah tangga dibiarkan menjadi tanggung jawab pribadi warga. Ironi ini, proyek triliunan rupiah berjalan di sebelah komunitas yang membiayai sendiri adaptasi terhadap krisis yang tidak mereka pilih, adalah ilustrasi paling telanjang dari Harvey's (2003) transfer biaya ekologis kepada kelompok yang paling tidak berdaya.

Dimensi fragmentasi sosial terlihat paling dramatis di Desa Bedono. Proyek tanggul secara harfiah membelah desa menjadi dua zona berbeda nasib yakni seperempat wilayah (tiga dusun) berada dalam *coverage* tanggul dan terlindungi dari rob, sementara tiga perempat wilayah di luar *coverage* justru menghadapi abrasi yang lebih parah akibat defleksi arus dari tanggul. Putusnya jalan penghubung antar-dusun mengubah jarak efektif dari 4 kilometer menjadi 10 kilometer, memaksa perjalanan memutar yang mengurangi intensitas interaksi sosial secara drastis. Bagas Kurniawan mengobservasi bahwa warga dari satu dusun kini "tidak tahu menahu" kondisi dusun tetangganya dalam satu desa yang sama, sebuah indikator kuat dari hancurnya ruang sosial bersama yang Harvey (2003) sebut sebagai *common goods* yang tidak ternilai.

Dimensi terdalam adalah erosi pengetahuan lokal dan identitas budaya pesisir. Ketika profesi nelayan dan petambak semakin tidak layak secara ekonomi, rantai transmisi pengetahuan lokal yang mencakup kalender musim melaut, navigasi berbasis bintang, dan prediksi cuaca lokal terancam putus. Bagas Kurniawan menangkap kondisi ini *"Yang hilang bukan hanya penghasilan. Yang hilang adalah cara mereka mengenal diri sendiri, cara mereka berhubungan dengan tempat di mana mereka lahir."* Tradisi Sedekah Laut yang berfungsi sebagai perekat sosial komunitas nelayan kehilangan kondisi dasarnya untuk berlangsung

bermakna ketika profesi nelayan semakin ditinggalkan dan akses ke pesisir semakin terbatas. Kehilangan seperti ini tidak masuk dalam formulir kompensasi manapun, namun inilah yang paling menentukan keberlanjutan komunitas dalam jangka panjang.

Tiga mekanisme *dispossession* Harvey (2003) terbukti bekerja secara simultan dalam kasus TTLSD, dengan perampasan akses melalui konstruksi yang memutus nelayan dari perairan tangkap dan menghancurkan ekosistem tambak, ketidaksetaraan kompensasi melalui mekanisme 'tanah musnah' dan skema kerohiman yang memaksa warga menerima nilai jauh di bawah kerugian riil, dan komodifikasi ruang melalui transformasi kawasan pesisir dari ruang hidup komunitas ke zona investasi industri sebagaimana tercantum dalam RTRW Jawa Tengah 2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan tiga kesimpulan yang saling berkaitan.

Pertama, implementasi kebijakan TTLSD berlangsung dalam struktur kewenangan yang sangat terpusat dan menutup hampir seluruh ruang partisipasi substantif masyarakat. Pergeseran kewenangan AMDAL ke KLHK pusat pasca-2021, sosialisasi yang bersifat informatif bukan deliberatif, dan represi struktural yang menjangkau hingga ke pejabat desa, semuanya mencerminkan *strategic selectivity* Jessop (2016) yang bekerja bukan melalui larangan eksplisit, melainkan melalui arsitektur kewenangan yang membuat suara komunitas kecil tidak punya jalan masuk ke meja keputusan.

Kedua, kebijakan TTLSD secara struktural memprioritaskan kepentingan perlindungan kawasan industri dan konektivitas logistik atas kepentingan langsung komunitas nelayan dan petambak. Bukti paling kelihatan adalah korelasi temporal antara lamanya rob melanda nelayan Sayung tanpa respons PSN, dan cepatnya respons ketika kawasan industri terancam. Rencana Sayung Industrial Park yang tercantum dalam RTRW Jawa Tengah November 2024 mengonfirmasi bahwa

transformasi ruang dari ruang hidup komunitas ke ruang investasi industri adalah bagian dari rencana yang sudah tertanam sejak awal, bukan sekadar dampak sampingan.

Ketiga, dampak sosial-ekonomi TTLSD terhadap masyarakat Desa Bedono dan Desa Sriwulan bersifat asimetris dan berlapis. Secara ekonomi, budidaya kerang hijau hancur total, siklus panen tambak memanjang dengan penurunan pendapatan 50-70 persen, dan seluruh biaya adaptasi ditanggung warga sendiri. Secara sosial, tanggul membelah komunitas dan jarak antar-dusun berlipat, meruntuhkan kohesi komunal. Dimensi paling dalam adalah erosi pengetahuan lokal dan identitas budaya pesisir yang tidak diakui dalam kalkulasi proyek manapun, namun justru yang paling menentukan keberlanjutan komunitas.

Frasa Nurohman merangkum keseluruhan kondisi ini dengan sangat tepat 'sudah jatuh dan diinjak kembali'. Dua dekade bencana rob tanpa perhatian negara yang memadai, diikuti oleh proyek infrastruktur yang mengambil sedikit yang tersisa melalui instrumen hukum yang tampak netral, adalah wajah paling konkret dari state capitalism Jessop dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, empat rekomendasi diajukan. Bagi Pemerintah Pusat yakni mekanisme pengawasan lingkungan dalam PSN perlu diperkuat dengan memberikan kewenangan pelaporan langsung ke KLHK dengan tenggat respons yang mengikat, dan konsep 'tanah musnah' dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 perlu direvisi untuk konteks bencana pesisir bertahap agar nilai kerohiman setara dengan kemampuan warga membeli lahan pengganti yang layak.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak yakni penetapan status bencana ekologis untuk pesisir Kecamatan Sayung perlu diperjuangkan segera karena membuka akses mekanisme bantuan yang selama ini tidak terjangkau, dan pembangunan jalan penghubung antar-dusun yang putus di Desa

Bedono perlu diprioritaskan karena dampaknya pada kohesi sosial komunitas.

Bagi organisasi masyarakat sipil yakni dokumentasi kerugian secara sistematis dan terukur perlu dibangun agar argumen ketidaksetaraan kompensasi bisa dikomunikasikan dalam format yang tidak bisa diabaikan pembuat kebijakan.

Bagi peneliti selanjutnya yakni studi longitudinal dua hingga tiga tahun setelah proyek beroperasi penuh sangat diperlukan untuk menilai apakah kondisi ekosistem membaik atau dampak yang ditemukan bersifat permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Sidiq, T. P., & Fukuda, Y. (2013). Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): Characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 4(3), 226–240.
- Biruni, E. S. M., & Kurniawati, W. (2021). Tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung terhadap rencana pengintegrasian pembangunan tanggul laut dengan Jalan Tol Semarang–Demak. *Jurnal Teknik PWK*, 10(2), 117–126.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. *Cities*, 29(1), 40–48.
- Jamaludin, H., & Mahdi, Z. (2025). Perlawanan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang–Demak. *Jurnal Sains Akademik*, 2(4), 1046–1065.
- Jessop, B. (2016). *The state: Past, present, future*. Polity Press.
- Levien, M. (2013). Regimes of dispossession: From steel towns to special economic zones. *Development and Change*, 44(2), 381–407.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy

- implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.
- Rachbini, D. J. (2002). *Ekonomi politik: Paradigma dan teori pilihan publik*. Ghalia Indonesia.
- Riyanto, A., Lituhayu, D., & Djumiari, D. (2022). Komunikasi sosial dalam implementasi proyek strategis nasional Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 1–18.
- Simandjuntak, D. H. (2020). Infrastruktur dan tata kelola pembangunan di Indonesia: Pelajaran dari proyek-proyek strategis nasional. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2), 135–160

